

ABSTRAK I

Tulisan ini dilatarbelakangi konsepsi Undang-Undang kepolisian Nomor 2 tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan Khusus yang di lakukan oleh penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 4, pasal,5 pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal, 10, pasal 106, pasal, 107, pasal, 109, pasal 110, pasal,112, pasal, 115, pasal, 120, pasal, 121. Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, dengan dasar untuk kepentingan penyidikan maka penyidikan dapat melakukan penahanan sesuai dengan ketentuan pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 24 KUHAP dengan dalil diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP, Dengan status tersangka baik ditahan maupun tidak ditahan oleh penyidik berkewajiban melakukan pengawasan terhadap tersangka tersebut, hal ini didasarkan pada peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia nomor. 7 tahun 2006 tentang Kode etik profesi Kepolisian Negara republik Indonesia dan peraturan kepala kepolisian Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.4 tahun 2005 tentang pengurusan Tahanan pada tahanan rumah Kepolisian Negara republik Indonesia. Judul Tesis Hukum Penulis mengangkat permasalahan tentang ' *peranan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Pembinaan Pelaku tindak Pidana*' sehingga dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana kewenangan penyidik Polri dalam masalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana , Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyidik Polri dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana , Bagaimana solusi ideal peranan penyidik Polri dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana , saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum di masa mendatang.

Judul Tesis Hukum Tulisan yang menggunakan model pendekatan yuridis-sosiologis ini mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang kebijakan pemerintah didalam memberikan wewenang agar penyidik ikut serta dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana dalam penegakan di Indonesia saat ini dan mencoba membandingkan dengan penerapan pembinaan dalam melakukan penyidikan Analisis data-data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis dengan tujuan untuk menguraikan tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan fakta yang berkaitan dengan upaya pembinaan terhadap napi yang melakukan tindak pidana, Penelitian Kepustakaan Berbagai bahan bacaan tentang system yang melakukan tindak pidana , hukum tentang tindak pidana, cara pembinaan napi di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian Lapangan Setelah penelitian kepustakaan dipandang cukup, kemudian melakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan

Kata Kunci : Penyidik Polri melakukan Penanganan

ABSTRAK

This paper is motivated conception Police Act No. 2 of 2002, namely the maintenance of security, order and enforce the law and give more protection, shelter and services to the community, as well as the Special coaching is done by the police investigators of the Republic of Indonesia

in Law Number. 8 of 1981 on the Penal pickles pidan (Criminal Procedure Code) in Article 4, Article, 5 of Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article, 10, chapter 106, section, 107, chapter, 109, Article 110 , chapters, 112 chapters, 115 chapters, 120, chapter, 121. In conducting the investigation as mentioned above, the basis for the purpose of investigation, the investigation may make an arrest in accordance with the provisions of article 20, article 21, article 22, and article 24 of the Criminal Procedure Code with the argument of alleged offense pidan based on sufficient evidence, by the provisions of article 21 paragraph (1) Criminal Procedure Code, the status of suspects either arrested or not arrested by the investigator is obliged to conduct surveillance of suspects, it's based on rules chief State police repoblik Indonesia number , 7 of 2006 concerning the State Police Code of professional conduct and regulations of the Republic of Indonesia State Police State police chief Repoblik Indonesia Nomor.4 2005 on the maintenance of Detention on house arrest repoblik Indonesia State Police. Law Thesis Title Author raised concerns about 'the role of the Indonesian National Police Investigator (INP) Actors in Development Pidana''sehingga offense defined in this study are as follows: How does the authority of police investigators in the matter of coaching terhadap perpetrators of criminal acts, any barriers police investigators faced in fostering terhadap criminal, how the ideal solution investigating police role in fostering the perpetrators of criminal acts, when and how of criminal law policy in law enforcement in the future.

Title thesis Legal writing using the model of socio-juridical approach is to try to answer questions about the government's policy didalm authorize that investigators participate in fostering terhadap criminal enforcement in Indonesia at the moment and try to compare with the adoption of guidance in conducting the investigation data analysis -data in this study, using descriptive analysis with the aim to elaborate on the rules and regulations pertaining to this study are deskriptif analysis is to describe and illustrate the facts relating to the development efforts for prisoners who committed a crime, Research Bibliography Various material on system for a criminal offense, the law on the crime, how coaching inmates at the Correctional Institution. Field research Once the research literature deemed sufficient, then conducting fieldwork in Prisons

Keywords: Police Investigators do Coaching